

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Federasi Rusia

Nur Rohim Yunus*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



10.15408/adalah.v5i1.38425

Abstract:

The Russian Federation is a federal state governed by a presidential system. Russia, functioning as a federation, encompasses a total of 85 federal subjects, each possessing varying degrees of autonomy. These levels of autonomy encompass republics, krais, oblasts, and autonomous districts. The executive branch of the Russian government is headed by a President who is elected directly by the populace and possesses extensive administrative authority. In addition to the aforementioned, there exists a Prime Minister who assumes the responsibility of executing governmental policies and overseeing the coordination of the cabinet. The Russian system of governance ensures a seamless integration of presidential and parliamentary components, facilitated by the presence of the Federal Assembly as a representative body that serves to maintain a balance of executive authority.

Keywords: Russian Federation; Form of state; Form of government; Government system

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

A. PROLOG

Federasi Rusia, yang terletak di Eropa Timur dan Asia Utara, adalah negara terbesar di dunia. Negara ini memiliki wilayah seluas sekitar 17,1 juta kilometer persegi dan memiliki topografi bervariasi yang mencakup berbagai wilayah, termasuk wilayah Arktik, dataran rendah, dan pegunungan.

Ada 85 subjek federal yang membentuk Rusia, yang merupakan sebuah federasi. Subyek federal ini meliputi republik, krai (wilayah), oblast (provinsi), okrug otonom (daerah otonom), dan kota federal. Pusat politik, ekonomi, dan budaya terbesar di Rusia adalah Moskow, yang juga berfungsi sebagai ibu kota negara.¹



Dimulai pada masa Kekaisaran Rusia dan berlanjut hingga Revolusi Bolshevik dan Uni Soviet, Rusia telah menjadi pusat pengaruh politik dan budaya yang menonjol sepanjang sejarahnya. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia menggantikan Uni Soviet sebagai negara penerusnya. Sejak itu, Rusia telah mengalami transformasi luar biasa dalam sistem politik, ekonomi, dan masyarakatnya.

¹ Volkov, Y. G., Diuzhikov, S. A., Imgrunt, S. I., Malitskiy, V. S., & Sagalaieva, E. S. (2015). Ideological problems of the modern Russia. *Review of European Studies*, 7(9), 162.

Sumber daya alam melimpah yang dimiliki Rusia, khususnya minyak, gas alam, dan logam, merupakan penggerak utama perekonomian negara tersebut. Namun, perekonomian Rusia juga dihadapkan pada kesulitan, terutama akibat ketidakstabilan harga komoditas dan sanksi internasional yang diterapkan oleh sejumlah negara Barat sebagai reaksi terhadap aktivitas Rusia dalam sejumlah perselisihan geopolitik.²

Dalam hal politik, Rusia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih setiap enam tahun sekali melalui proses pemilihan umum. Untuk semua maksud dan tujuan, presiden adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan administratif yang luas. Konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi sistem politik, dan konstitusi inilah yang mengatur pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.



² Oversloot, H. (2004). Towards a Revival of the State as an Ideology in Contemporary Russia. In *Civil Society, Religion, and the Nation* (pp. 73-87). Brill.

Budaya Rusia sangat beragam dan kaya, dengan kontribusi yang signifikan dalam bidang sains, musik, sastra, dan seni rupa. Karya klasik seperti novel Tolstoy dan Dostoevsky, musik klasik gubahan Tchaikovsky dan Rachmaninoff, serta karya seni avant-garde karya seniman seperti Kandinsky dan Malevich merupakan contoh karya yang berasal dari Rusia.

Dalam hal geopolitik, Rusia merupakan pemain penting dalam berbagai permasalahan internasional, seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah, hubungan dengan negara-negara Eropa, dan persaingan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk pengaruh ekonomi global.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Negara Rusia dan Implikasinya dalam Pembagian Wilayah

Federasi Rusia adalah negara federal, yang berarti kekuasaan di dalamnya terbagi antara pemerintah federal, yang berkantor pusat di Moskow, dan unit otonom yang disebut sebagai subjek federal dari pemerintah federal. Federasi Rusia terdiri dari 85 subyek federal, yang masing-masing mempunyai tingkat otonomi yang berbeda-beda, sesuai dengan konstitusi.³

³ Konstitusi Federasi Rusia adalah hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan dan hak-hak warga negara di Rusia. Disahkan pada tahun 1993, konstitusi ini menetapkan Federasi Rusia

Permasalahan nasional, termasuk militer, kebijakan luar negeri, dan kebijakan moneter, berada di bawah wewenang pemerintah federal, yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Sebaliknya, pemerintah federal mempunyai wewenang atas berbagai pilihan dalam negeri, termasuk pilihan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan sosial.⁴

Kerangka kerja federal disusun sedemikian rupa sehingga setiap subjek federal memiliki konstitusi dan pemerintahannya sendiri, yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan dalam negeri dan melaksanakan kebijakan lokal. Di sisi lain, pemerintah federal terus memegang wewenang untuk memastikan bahwa undang-undang federal dipatuhi di seluruh wilayah Federasi Rusia.

Bentuk negara federal menawarkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang signifikan, yang sangat berguna bagi negara seukuran Rusia, yang memiliki masyarakat dan budaya yang beragam di wilayahnya yang luas. Selain itu, sistem federal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa berbagai

sebagai negara demokratis federal yang berdasarkan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

⁴ Elena, G., & Olga, Z. (2017). State environmental ideology: from tsarist empire to sustainable Russia. *Brics law journal*, 4(4), 39-64.

kelompok budaya dan etnis Rusia tetap hidup berdampingan secara damai.⁵

Dengan menetapkan subjek federal yang mempunyai keleluasaan dalam mengatur pemerintahan dan pembuatan kebijakan lokal, struktur federal Federasi Rusia secara sistematis membagi wilayah negaranya. Geografi, populasi, dan sejarah merupakan beberapa variabel yang membentuk wilayah tersebut.



Pembagian wilayah ini mencakup beberapa jenis subjek federal, seperti:⁶

Pertama: Republik. Ada berbagai distrik di Rusia yang diberi status republik. Republik-republik ini biasanya mempunyai mayoritas etnis tertentu dan diberikan otonomi yang lebih besar, termasuk wewenang untuk berbicara dalam bahasa resmi mereka dan mengendalikan urusan dalam negeri mereka sendiri.

Kedua: Krai dan Oblast. Krai dan oblast adalah otonomi federal yang memiliki kemiripan dengan provinsi atau wilayah administratif lainnya di negara

⁵ Kortukov, D. (2020). 'Sovereign Democracy' and the Politics of Ideology in Putin's Russia. *Russian Politics*, 5(1), 81-104.

⁶ Bowring, B. (2013). *Law, Rights and Ideology in Russia: Landmarks in the destiny of a great power*. routledge.

Rusia. Namun, Republik memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan Krai dan Oblast.

Ketiga: Distrik Otonom. Rusia juga memiliki beberapa distrik otonom, yang sering kali diberikan status khusus karena populasi minoritas etnis yang signifikan.

Keempat: Kota Federal. Beberapa kota besar di Rusia, seperti Moskow dan St. Petersburg, memiliki status khusus sebagai subjek federal, yang memberi mereka otonomi lebih besar dalam mengatur urusan mereka sendiri.

Penerapan pemekaran wilayah ini memfasilitasi proses tata kelola dan pengambilan keputusan yang efisien di dekat komunitas lokal. Selain itu, kategorisasi ini juga merupakan manifestasi dari heterogenitas etnis, budaya, dan geografis yang luas di Rusia.⁷ Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Federasi Rusia dibagi menjadi beberapa divisi teritorial secara metodis, pemerintah federal terus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan nasional diterapkan dapat berlaku secara seragam di seluruh negeri. Tak heran bila beberapa kebijakan pusat memaksakan daerah untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pusat atas dasar unifikasi hukum.

⁷ Humphrey, C. (2003). 'Eurasia', ideology and the political imagination in provincial Russia. In *Postsocialism* (pp. 270-288). Routledge.

2. Bentuk Pemerintahan Rusia dan Implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

Federasi Rusia dicirikan sebagai republik dan bukan monarki. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintahan suatu negara tidak bergantung pada suksesi raja, namun bergantung pada hasil pemilu atau mekanisme demokrasi lainnya. Di Rusia, presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk jangka waktu tertentu, yang kini ditetapkan enam tahun.

Berbagai fungsi eksekutif didelegasikan kepada Presiden Rusia, yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski begitu, presiden tidak memiliki kekuasaan absolut karena konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebaliknya, monarki adalah jenis pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu yang memperoleh kedudukannya berdasarkan garis keturunan nenek moyangnya. Ada dua jenis kekuasaan di bawah monarki: kekuasaan konstitusional, di mana raja menjalankan peran seremonial dan simbolis, dan kekuasaan absolut, di mana raja mempunyai wewenang penuh dan total atas negara.⁸

Menyusul runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, terjadi pergeseran politik besar-besaran, yang

⁸ Ilmu negara

berujung pada pemilihan bentuk pemerintahan republik untuk Federasi Rusia. Keputusan ini diambil akibat perubahan politik signifikan yang terjadi. Sebuah konstitusi yang mendukung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil telah diberlakukan oleh Rusia sejak saat itu. Konstitusi ini menetapkan kerangka kerja pemerintahan republik dan mendukung prinsip-prinsip ini.

Federasi Rusia diatur berdasarkan bentuk pemerintahan republik, yang menghasilkan pembagian kekuasaan bersama antara lembaga-lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menjalankan fungsi eksekutif. Dewan Federasi dan Duma Negara adalah dua kamar yang membentuk Majelis Federal, yang merupakan entitas yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat Rusia.⁹



⁹ Mäger, K. (2016). Russia's Illiberal Ideology and Its Influences on the Legislation in the Sphere of Civil and Political Rights. *Baltic Yearbook of International Law Online*, 15(1), 148-168.

Pertama: Duma Negara. Duma Negara merupakan lembaga legislatif yang lebih rendah, atau biasa disebut "kamar bawah". Anggota Duma dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat untuk jangka waktu lima tahun. Membuat undang-undang, melakukan amandemen konstitusi, dan mengawasi seberapa baik kinerja pemerintah adalah tanggung jawab utama Duma. Jika dibandingkan dengan Parlemen Indonesia, maka Duma merupakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan salah satu kamar Legislatif di Indonesia.

Kedua: Dewan Federasi. Dewan Federasi adalah lembaga legislatif yang lebih tinggi, atau "kamar atas". Dewan Federasi terdiri dari delegasi dari setiap subjek federal (republik, krai, oblast, dll.), yang ditunjuk oleh otoritas eksekutif dan legislatif setempat. Perwakilan-perwakilan ini merupakan keanggotaan Dewan Federasi. Merupakan tanggung jawab Dewan Federasi untuk membuat undang-undang dan memberikan persetujuannya terhadap keputusan-keputusan penting, seperti perubahan wilayah dalam yurisdiksi Federasi. Lembaga ini sering disebut juga sebagai Senator, di Indonesia disebut dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili daerah atau Propinsi.

Presiden Rusia merupakan pemimpin cabang eksekutif setelah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang berlangsung selama enam tahun. Selain mempunyai

kekuasaan eksekutif yang luas, presiden juga bertanggung jawab mengambil keputusan politik, menentukan kebijakan luar negeri, menjamin pertahanan, dan menjalankan pemerintahan.¹⁰

Terwujudnya sistem checks and balances dalam kerangka sistem pemerintahan Federasi Rusia yang dilakukan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah siapa pun menyalahgunakan posisinya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat yang diwakili oleh Majelis Federal.

3. Sistem Pemerintahan Rusia dan Implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan

Pemerintahan Federasi Rusia menganut sistem presidensial, yang berarti presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan ia diberi wewenang eksekutif yang luas. Presiden adalah orang yang dipilih melalui proses pemilihan umum dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan

¹⁰ Kosolapov, N. A. (1995). An Integrative Ideology for Russia: The Intellectual and Political Challenge. *Russian Studies in Philosophy*, 33(4), 6-40.

pemerintahan, pengangkatan pejabat tinggi, perlindungan negara, dan politik luar negeri.¹¹

Meskipun Federasi Rusia menganut sistem presidensial, terdapat juga jabatan perdana menteri. Perdana Menteri adalah pemimpin pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, koordinasi anggota kabinet, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ekonomi.



Presiden adalah orang yang mengangkat perdana menteri, yang biasanya ia pilih dari partai yang memegang mayoritas di Duma Negara atau dari koalisi partai-partai yang mendukung presiden. Untuk merumuskan kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari, perdana menteri bekerja sama erat dengan presiden.

Dimasukkannya seorang perdana menteri ke dalam struktur pemerintahan Federasi Rusia memperkenalkan elemen tambahan kerjasama antara cabang eksekutif dan legislatif. Meskipun presiden mempunyai wewenang administratif tertinggi, perdana menteri dan kabinetnya memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan

¹¹ Lazarev, V. V. (2021). CoNSTITuTIoN AND AxIoLoGy STATE-LEGAL IDEoLoGy. Юридическая наука: история и современность, 36.

berkolaborasi dengan Duma Negara dalam proses legislatif.¹²

Kehadiran perdana menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Federasi Rusia menandakan masuknya komponen parlementer yang meningkatkan struktur pemerintahan dan memfasilitasi kerja sama antara cabang eksekutif dan legislatif.

Sistem pemerintahan Presidensial di Federasi Rusia sangat mementingkan lembaga kepresidenan, khususnya Presiden. Sistem ini mengharuskan Presiden memiliki wewenang administratif yang luas dan menjalankan peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kedudukan lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintahan Presidensial di Federasi Rusia mencakup beberapa aspek, yaitu:¹³

Pertama: Kekuasaan Eksekutif. Presiden memegang posisi teratas dalam hierarki pemerintahan dan memiliki wewenang administratif yang luas. Hal ini mencakup seleksi individu yang menduduki posisi otoritas tinggi, proses pengambilan pilihan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pengawasan kebijakan penting

¹² Hanson, S. (1999). Ideology, interests, and identity. Center-periphery conflict in post-Soviet Russia: A federation imperiled, 15-46.

¹³ Hanson, S. (1999). Ideology, interests, and identity. Center-periphery conflict in post-Soviet Russia: A federation imperiled, 15-46.

yang berkaitan dengan keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan perekonomian.

Kedua: Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden Federasi Rusia mempunyai peran ganda sebagai kepala negara, mewakili negara baik di dalam negeri maupun internasional, sekaligus memikul tanggung jawab mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Ketiga: Peran Simbolis. Presiden berperan sebagai simbol nasional dan berperan penting dalam membina kohesi sosial dan menegakkan persatuan dan kedaulatan negara baik di dalam negeri maupun internasional.

Keempat: Kepemimpinan Politik. Presiden mempunyai kekuasaan politik yang signifikan dan mempunyai pengaruh besar dalam membentuk arah politik negara. Kewenangan politik yang dipegang oleh Presiden memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan politik dan arah perjalanan bangsa, meskipun terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh konstitusi dan batasan hukum.

Oleh karena itu, dalam kerangka sistem pemerintahan Presidensial di Federasi Rusia, lembaga presidensial mempunyai posisi penting dalam penyelenggaraan negara dan perumusan orientasi kebijakan. Presiden mengemban peran utama sebagai pemimpin pemerintahan dan menjabat sebagai wakil negara baik di dalam negeri maupun internasional.

Sebagai kepala pemerintahan kedua di Federasi Rusia, setelah Presiden, Perdana Menteri memainkan peran penting dalam pemerintahan dan bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan. Perdana Menteri Federasi Rusia bertanggung jawab atas berbagai tugas dan posisi, beberapa di antaranya adalah:¹⁴

Pertama: Pelaksana Kebijakan Pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan Majelis Federal merupakan tanggung jawab Perdana Menteri, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kabinet berada di bawah kepemimpinannya, dan dia bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah di seluruh Rusia.

Kedua: Koordinasi Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Untuk mengoordinasikan tindakan pemerintah di banyak kementerian dan lembaga, Perdana Menteri bekerja sama erat dengan kabinet. Diantaranya perumusan keputusan strategis, perumusan kebijakan, dan pemantauan pelaksanaan keputusan yang diambil Pemerintah.

Ketiga: Hubungan dengan Majelis Federal. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan rutin kepada Majelis Federal, khususnya Duma Negara, mengenai berbagai program pemerintah, keadaan perekonomian saat ini, dan hal-hal penting lainnya. Sebagai kemungkinan

¹⁴ Budraitskis, I. (2022). *Dissidents Among Dissidents: Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia*. Verso Books.

tambahan, ia berpotensi mengajukan proposal legislatif ke Majelis Federal untuk disetujui.

Keempat: Perwakilan Pemerintah. Perdana Menteri seringkali menjadi tokoh masyarakat yang mewakili pemerintah di berbagai acara formal, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Merupakan tanggung jawabnya untuk mewakili pemerintah di berbagai bidang internasional, dan ia juga bertemu dengan kepala negara negara lain untuk membahas kemungkinan kolaborasi bilateral dan multilateral.

Kelima: Pengganti Presiden. Perdana Menteri berhak menjabat sebagai pengganti Presiden untuk sementara apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya karena sakit atau berhalangan sebentar. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemerintahan tetap berjalan tanpa adanya gangguan.¹⁵



¹⁵ Braghiroli, S., & Makarychev, A. (2016). Russia and its supporters in Europe: trans-ideology à la carte?. *Southeast European and Black Sea Studies*, 16(2), 213-233. White, S. (1988). Ideology and Soviet politics. In *Ideology and Soviet politics* (pp. 1-20). London: Palgrave Macmillan UK.

Presiden, yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Federasi Rusia, tetap menjalankan kendali atas kekuasaan Perdana Menteri, meskipun Perdana Menteri memainkan peranan penting dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam hal operasional dan administratif. . Perdana Menteri juga bertanggung jawab kepada Presiden mengenai pelaksanaan tugasnya.

C. EPILOG

Keberadaan Perdana Menteri merupakan komponen yang menarik dan unik dalam kerangka konstitusi yang mengatur Federasi Rusia. Hal ini terjadi karena Federasi Rusia beroperasi berdasarkan bentuk pemerintahan presidensial, bukan sistem parlementer seperti yang diterapkan di sejumlah negara lain.

Dalam kerangka pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden, kehadiran Perdana Menteri memberikan tambahan aspek pada struktur pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, koordinasi kabinet, dan hubungan dengan Majelis Federal. Meskipun Presiden adalah tokoh kunci dengan kekuasaan eksekutif yang luas, Perdana Menteri memainkan peran penting dalam pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Federasi Rusia, keberadaan Perdana Menteri menjamin adanya

kesinambungan antara unsur-unsur sistem presidensial dan legislatif yang bertanggung jawab menjalankan negara. Meskipun Perdana Menteri adalah anggota lembaga eksekutif, keberadaan Perdana Menteri menyiratkan adanya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kolaborasi ini menghasilkan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, kehadiran Perdana Menteri dalam kerangka sistem pemerintahan Federasi Rusia menunjukkan adanya dinamika yang khas dan rumit, yang berkontribusi pada peningkatan prosedur politik dan administrasi negara tersebut.

REFERENSI:

- Bowring, B. (2013). *Law, Rights and Ideology in Russia: Landmarks in the destiny of a great power*. routledge.
- Braghiroli, S., & Makarychev, A. (2016). Russia and its supporters in Europe: trans-ideology à la carte?. *Southeast European and Black Sea Studies*, 16(2), 213-233.
- Budraitskis, I. (2022). *Dissidents Among Dissidents: Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia*. Verso Books.

- Elena, G., & Olga, Z. (2017). State environmental ideology: from tsarist empire to sustainable Russia. *Brics law journal*, 4(4), 39-64.
- Hanson, S. (1999). Ideology, interests, and identity. Center-periphery conflict in post-Soviet Russia: A federation imperiled, 15-46.
- Hanson, S. (1999). Ideology, interests, and identity. Center-periphery conflict in post-Soviet Russia: A federation imperiled, 15-46.
- Humphrey, C. (2003). 'Eurasia', ideology and the political imagination in provincial Russia. In *Postsocialism* (pp. 270-288). Routledge.
- Kortukov, D. (2020). 'Sovereign Democracy' and the Politics of Ideology in Putin's Russia. *Russian Politics*, 5(1), 81-104.
- Kosolapov, N. A. (1995). An Integrative Ideology for Russia: The Intellectual and Political Challenge. *Russian Studies in Philosophy*, 33(4), 6-40.
- Lazarev, V. V. (2021). Constitution and Axiology STATE-LEGAL Ideology. *Юридическая наука: история и современность*, 36.
- Mäger, K. (2016). Russia's Illiberal Ideology and Its Influences on the Legislation in the Sphere of Civil and Political Rights. *Baltic Yearbook of International Law Online*, 15(1), 148-168.
- Oversloot, H. (2004). Towards a Revival of the State as an Ideology in Contemporary Russia. In *Civil*

Society, Religion, and the Nation (pp. 73-87).
Brill.

Volkov, Y. G., Diuzhikov, S. A., Imgrunt, S. I.,
Malitskiy, V. S., & Sagalaieva, E. S. (2015).
Ideological problems of the modern Russia.
Review of European Studies, 7(9), 162.

White, S. (1988). Ideology and Soviet politics. In
Ideology and Soviet politics (pp. 1-20). London:
Palgrave Macmillan UK.